



LAPORAN SINGKAT **KOMISI I DPR RI**

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT) DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke : 25 (dua puluh lima)
Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Panja USO dan PNBPI ke-2
Dengan : Dirjen PPI Kemenkominfo, Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas RI.
Hari, Tanggal : Kamis, 1 Oktober 2015
Pukul : 10.50 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Tantowi Yahya
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Konsep Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan *Universal Service Obligation* (USO)
2. Landasan hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan *Universal Service Obligation* (USO)
Hadir : 1. ... orang dari 28 Anggota Panja USO dan PNBPI Komisi I DPR RI
2. Dirjen PPI Kemenkominfo, Prof. Dr. Kalamullah Ramli
3. Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Dr. Moh. Budi Setiawan
4. Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani, SE, MA
5. Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas RI, Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.50 WIB dan dinyatakan Terbuka Untuk Umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI Kemenkominfo, Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas RI pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya.

II. CATATAN :

1. Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI memberikan catatan sebagai berikut:
 - a. Menekankan kepada Kementerian Keuangan mengenai pentingnya revisi regulasi mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) USO, sehingga perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap dana PNBP USO sesuai peruntukan kebutuhan, transparan serta tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Menekankan kepada Kementerian Keuangan dan Kemenkominfo mengenai pentingnya revisi regulasi terkait kelembagaan dan struktur organisasi yang menyelenggarakan pengelolaan dana USO.
 - c. Mendorong Kemkominfo untuk merevisi regulasi program pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menggunakan dana PNBP dan dana *Universal Service Obligation* (USO), dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tepat.
 - d. Mendorong Bappenas dan Kemkominfo untuk melakukan sinergi dalam perencanaan program pembangunan TIK, sehingga terjadi sinkronisasi dalam bentuk program yang sejalan dengan perkembangan TIK dan kebutuhan masyarakat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 1 Oktober 2015
KETUA RAPAT,

TTD

TANTOWI YAHYA
A-252